



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis 4 September 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	: Pembahasan RKA K/L Tahun 2026
Ketua Rapat	: Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Sekretaris Kementerian PANRB C. Sekretaris Utama BKN D. Sekretaris Utama LAN E. Sekretaris Utama ANRI F. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI G. Sekretaris OIKN H. Sekretaris Jenderal KPU I. Sekretaris Jenderal Bawaslu

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kementerian PANRB, Sekretaris Utama BKN, Sekretaris Utama LAN, Sekretaris Utama ANRI, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Sekretaris OIKN, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu, dengan agenda pembahasan RKA K/L Tahun 2026, hari Kamis, 4 September 2025,

dibuka pukul 10.14 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Kementerian PANRB

- a. Realisasi APBN TA 2024 sebesar Rp408,02 M dengan serapan 98,32%, opini WTP dari BPK.
- b. Capaian utama: peningkatan indeks RB (K/L 82,98; Provinsi 74,63; Kab/Kota 69,46), peningkatan nilai SAKIP nasional (65,55), penguatan SPBE (indeks 3,12), serta perluasan Mal Pelayanan Publik Digital.
- c. Rencana 2026: penataan kelembagaan kabinet, penguatan sistem merit ASN, percepatan transformasi digital, serta grand design reformasi birokrasi 2025–2045.
- d. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026: **Rp392.980.127.000,-** dengan usulan tambahan **Rp80.409.013.000,-**.

2. BKN

- a. Realisasi 2024: serapan anggaran >97%, capaian utama pada pengelolaan data ASN, pelaksanaan seleksi CASN, serta penerapan sistem merit.
- b. Tantangan: integrasi data ASN dan akselerasi digitalisasi layanan kepegawaian.
- c. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026 **Rp639.467.823.000,-** dengan usulan tambahan **Rp500 M**.

3. LAN

- a. Realisasi 2024 dan progres 2025: transformasi pengembangan kompetensi ASN melalui ASN Corpu, dengan peningkatan partisipasi instansi dalam self-assessment (301 instansi per Agustus 2025).
- b. Prioritas: pengembangan platform pembelajaran ASN (ASN Berpijar), peningkatan kualitas analisis kebijakan, serta program Sekolah Rakyat & Koperasi Merah Putih sesuai direktif Presiden.
- c. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026: **Rp293.349.382.000,-** usulan tambahan **Rp55.600.000.000,-**.

4. ANRI

- a. Capaian 2024: pengelolaan arsip nasional, digitalisasi arsip statis, serta dukungan SPBE melalui e-arsip.
- b. Rencana 2026: percepatan pembangunan Sistem Kearsipan Nasional Digital, penguatan kapasitas arsiparis, dan program literasi kearsipan masyarakat.
- c. Pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2026 yang diajukan ANRI sebesar **Rp7.932.990.000,-** dari Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional ke Program Dukungan Manajemen
- d. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026: **Rp279.335.383.000,-** usulan tambahan **Rp148.153.162.000,-**.

5. Ombudsman RI (ORI)

- a. Capaian 2024: penyelesaian laporan masyarakat dengan tingkat keberhasilan 69,18% ditindaklanjuti.
- b. Rencana 2026: penguatan pengawasan pelayanan publik, digitalisasi pengelolaan laporan, serta perluasan kantor perwakilan daerah.
- c. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026: **Rp251.978.173.000,-** usulan tambahan **Rp199.348.354.000,-**.

6. OIKN

- a. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026: **Rp6.262.046.870.000,-**.
- b. Usulan tambahan **Rp14.920.000.000.000,-** untuk pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, hunian pendukung, serta infrastruktur aksesibilitas di IKN.
- c. Program utama: pengembangan kawasan strategis (Rp5,6 T) dan dukungan manajemen (Rp644 M).
- d. Fokus: pembangunan gedung DPR, DPD, MA, MK, hunian ASN, serta infrastruktur dasar di IKN.

7. KPU

- a. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026: **Rp3.539.587.941.000**, dengan komposisi:
 - Program Dukungan Manajemen Rp3,45 T (97,53%).
 - Program Penyelenggaraan Pemilu Rp87,3 M (2,47%).
- b. Peruntukan: belanja pegawai (62,5%), operasional kantor (32,8%), dan kegiatan non-operasional (4,7%).
- c. Prioritas: pembinaan pengawasan internal, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih, serta penguatan kelembagaan teknis kepemiluan.

8. Bawaslu

- a. Fokus 2026: penguatan pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemanfaatan teknologi untuk monitoring tahapan, serta peningkatan kapasitas SDM pengawas.
- b. Pagu anggaran anggaran RAPBN tahun 2026:
Rp2.472.934.469.000,-..

III. KESIMPULAN RAPAT

Kementerian PANRB, Sekretaris Utama BKN, Sekretaris Utama LAN, Sekretaris Utama ANRI, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Sekretaris OIKN, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu, dengan agenda pembahasan RKA K/L Tahun 2026, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran RAPBN tahun 2026 yang diajukan mitra kerja sebagai berikut:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebesar **Rp392.980.127.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);**
 - b. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebesar **Rp639.467.823.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);**
 - c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebesar **Rp293.349.382.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);**
 - d. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebesar **Rp279.335.383.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);**
 - e. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebesar **Rp251.978.173.000,- (dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);**
 - f. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar **Rp6.262.046.870.000,- (enam trilyun dua ratus enam puluh dua milyar empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
 - g. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebesar **Rp3.539.587.941.000,- (tiga trilyun lima ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);**
 - h. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebesar **Rp2.472.934.469.000,- (dua trilyun empat ratus tujuh**

puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Namun untuk pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing program, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB, BKN, LAN, ANRI, ORI, OIKN, KPU RI, dan Bawaslu RI melakukan penyesuaian dengan memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali dan untuk ditetapkan pada rapat selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menyetujui pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2026 yang diajukan ANRI sebesar **Rp7.932.990.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dari Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional ke Program Dukungan Manajemen.
3. Komisi II DPR RI menerima usulan tambahan anggaran RAPBN tahun 2026 yang diajukan sebagai berikut:
 - a. Kementerian PANRB sebesar **Rp80.409.013.000,- (delapan puluh milyar empat ratus sembilan juta tiga belas ribu rupiah);**
 - b. BKN sebesar **Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);**
 - c. LAN sebesar **Rp55.600.000.000,- (lima puluh lima milyar enam ratus juta rupiah);**
 - d. ANRI sebesar **Rp148.153.162.000,- (seratus empat puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);**
 - e. ORI sebesar **Rp199.348.354.000,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);**
 - f. OIKN sebesar **Rp14.920.000.000.000,- (empat belas trilyun sembilan ratus dua puluh milyar rupiah).**

Terhadap usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi II DPR RI akan mendalami lebih lanjut pada rapat berikutnya.

4. Komisi II DPR RI meminta kepada seluruh mitra kerja Komisi II DPR RI dalam pengelolaan anggaran disesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dalam pengalokasian anggaran mengutamakan program prioritas nasional serta program substantif yang berdampak langsung pada pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan dan menjawab kebutuhan masyarakat sesuai tantangan yang dihadapi.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

JAKARTA, 4 SEPTEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si.
A-325